



PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

Iin Ningsih¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan luhur Bendan
Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perencanaan dan program Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran dan pencairan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta tanggapan masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Penelitian ini adalah penelitian evaluatif atau *ex post facto* fokus penelitian ber subjek pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Dengan Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan berpedoman dan dokumentasi. Dengan teknik pengambilan sample adalah *cluster random sampling*, dengan sample 6 Desa dan 20 orang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai responden. Dengan teknik Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Proses perekrutan terhadap penerima BLT di Kecamatan Wonotunggal masih belum tepat sasaran karena dengan menggunakan metode yang kurang tepat, sehingga mengakibatkan beberapa warga masyarakat salah sasaran, yang seharusnya tidak menerima BLT jadi penerima BLT; (2) Pencairan serta penyaluran dana berjalan dengan terbuka, transparan dan lancar, dengan penerimaan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tiga bulan per warga ,asyarakat penerima;(3) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT di Kecamatan Wonotunggal telah dilakukan pengawasan pada proses rekrutmen maupun pencairan dana; (4) Respon dan tanggapan masyarakat sangat senang dan positif terhadap adanya program pelaksanaan BLT karena sangat membantu warga masyarakat yang ekonominya dibawah sejahtera.

Kata Kunci : perencanaan, program, BLT, evaluasi, Wonotunggal

Abstract

This research is intended to evaluate the planning and program of Direct Cash Assistance Recipients (BLT). Evaluation and supervision of the distribution and disbursement of funds for the Direct Cash Assistance (BLT) program as well as community responses to the Cash Direct Assistance program. This research was conducted in Wonotunggal District, Batang Regency. This research is an evaluative or ex post facto research focus on the subject of the community receiving Direct Cash Assistance (BLT) in Wonotunggal District, Batang Regency, with data collection techniques using interview methods with guidance and documentation. The sampling technique used was cluster random sampling, with a sample of 6 villages and 20 people receiving direct cash assistance (BLT) as respondents. With interview and documentation techniques. The results of the study are as follows: (1) The recruitment process for BLT recipients in Wonotunggal sub-district is still not right on target because it uses an inaccurate method, resulting in some community members being mistargeted, who should not have received BLT to become BLT recipients; (2) The disbursement and distribution of funds proceeded in an open, transparent and smooth manner, with receipts of Rp. 300,000, - (three hundred thousand rupiah) per three months per resident, recipient community; (3) In the implementation of BLT distribution in Wonotunggal District, supervision has been carried out on the recruitment process and disbursement of funds; dan (4) The community's response and responses are very happy and positive about the existence of the BLT implementation program because it really helps people whose economy is under prosperous.

Keywords: planning, program, BLT, evaluation, Wonotunggal

PENDAHULUAN

Kenaikan beberapa bahan pokok sangat menambah beban hidup masyarakat ditambah dengan belakangan ini harga BBM sebagian naik, harga gas elpiji yang mana dampaknya semua barang dan jasa ikut merangkak naik. Sehingga hal tersebut membuat daya beli masyarakat menurun terutama pada rumah tangga kelas menengah kebawah. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga sasaran.

Akan tetapi meski telah ditetapkan dengan peraturan mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun untuk jumlah penerima membengkak, banyak warga masyarakat yang mengaku miskin setelah pencanangan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun kendala dalam pencanangan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara sentalistik dengan tujuan mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kelas menengah kebawah menimbulkan dampak tersendiri di tingkat lingkungan masyarakat lokal yang dapat menimbulkan konflik sosial. Di antaranya ada perselisihan di antara masyarakat karena ada yang seharusnya layak untuk mendapat BLT tetapi malahan tidak dapat dan sebaliknya, karena data dari pemerintah pusat tidak begitu akurat atau data kurang update, yang tahun lalu masuk rumah tangga miskin bisa jadi sekarang sudah menjadi rumah tangga yang mapan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkesan sebagai program dadakan dan bagian dari politik Pemerintah, dalam hal ini terlihat dari tidak cukupnya waktu untuk memverifikasi data rumah tangga yang pantas untuk menerima BLT tersebut. BPS hanya diberi waktu satu bulan untuk menyiapkan teknis terkait hal tersebut. Mulai dari mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan mempersiapkan data rumah tangga

yang layak mendapatkan BLT samapi menyiapkan stiker sebagai tanda keluarga penerima BLT agar mudah dikenali, serta memberikan akses data yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial. Sehingga permasalahan yang timbul di lapangan adalah masalah pendataan yang tidak tepat sasaran dan ketidakpuasan masyarakat atas program dana bantuan BLT ini. Ketidakpuasan masyarakat ini di ikuti oleh ancaman dan tindak kekerasan baik kepada pihak BPS, RT/RW maupun Perangkat Desa setempat. Dari kejadian tersebut ada beberapa Perangkat Desa yang mendapat makian, omongan tidak mengenakan bahkan saling membenci antar masyarakat.

Program bantuan ini dirancang dalam rangka kompensasi dari pengurangan subsidi BBM, dalam hal ini pemerintah menyediakan dana kompensasi kurang lebih 15.5 juta masyarakat miskin. Dari setiap masyarakat miskin tersebut diberikan 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan diterimakan setiap tiga bulan sekali, dalam penyaluran BLT Tahap pertama Pemerintah mngucurkan dana sebesar kurang lebih 4,6 (empat koma enam) triliun untuk rumah tangga miskin yang diselurkan melalui PT. POS Indonesia.

Di Kecamatan Wonotunggal masih ada beberapa dilema banyak masyarakat masih menanyakan mengenai rekrutmen pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), transparansi dan pelaporan BLT. Pelaksanaan penyaluran dana BLT perlu adanya penataan dan evaluasi program untuk mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang timbul baik pada manajemennya maupun konflik yang timbul di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat dan permasalahan dari adanya penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari kompensasi kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keakuratan data penerima BLT di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
2. Untuk mengetahui apakah penyaluran dan pencairan dana BLT sudah transparan;
3. Untuk mengetahui apakah program dan evaluasi sudah berjalan dengan baik;
4. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program BLT;
5. Untuk bahan evaluasi bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki program BLT selanjutnya ;
6. Dapat diketahui secara objektif dan nyata pelaksanaan program BLT di Kecamatan Wonotunggal.

METODE

Menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara terperinci mengenai manfaat dan dampak dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga untuk mengetahui gejala dan fenomena yang di alami subjek dalam penelitian secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Meolong., 2004:6), Sedangkan menurut Muhajir (2003:209) mengatakan bahwa "Penelitian evaluatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan dari sebuah kebijakan, pelaksanaan program dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (feasible) atau tidak". Sehingga dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh obyek maupun subyek penelitian sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam membina dan mengarahkan sebuah program kegiatan agar berhasil dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan pokok dan harga BBM bagi rumah tangga miskin, dalam pemberian subsidi perhitungannya adalah Kepala Keluarga dengan besaran kompensasi 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan dan diterimakan selama 3 (tiga) bulan sekali. Penentuan data penerima Bantuan langsung Tunai adalah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan disalurkan melalui PT.POS Indonesia yang sudah ditentukan.

Warga yang akan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu sebagai berikut :

1. Rumah berlantai tanah;
2. Tidak mempunyai fasilitas toilet yang memadai;
3. Rumah masih ber dinding dari papan/kayu murahan/rumbia/tembok yang belum di plester;
4. Belum menggunakan listrik;
5. Sumber air minum menggunakan sumur/sumber mata air lainnya yang tidak terlindung;
6. Menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak sehari-hari;
7. Dalam seminggu mengkonsumsi daging/susu/ayam Cuma sekali;
8. Makan hanya bisa dua / satu kali dalam sehari;
9. Mampu beli pakaian hanya satu kali dalam satu Tahun;
10. Tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan ke puskesmas/klinik;
11. Penadapatan kepala keluarga kurang dari 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan;
12. Pendidikan tertinggi kepala keluarga SD Sederajat/tidak sekolah;
13. Tidak memiliki barang berharga yang mudah dijual;
14. Tidak memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi.

Dengan demikian ketepatan dalam merekrut dan menyaring data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika dilakukan dengan benar-benar sesuai kriteria dan petunjuk di atas, dan langkah

sebelum melakukan penyaringan data warga penerima BLT adalah dengan melakukan rekrutmen petugas yang akan menjadi penanggung jawab atas kegiatan penyaluran dana BLT tersebut yaitu petugas koordinator statistik kecamatan (KSK), selain KSK juga dibentuk Pembantu Koordinator Kecamatan (PKSK) yang direkrut dari Perangkat Desa yang bertugas sebagai pencacah. Sebagian besar petugas pencacah ini adalah Kepala Dusun yang dibantu oleh ketua RT setempat, Mereka ini bertugas mendata dan meminta warga mengisi formulir bagi calon penerima BLT dan menyerahkannya pada KSK.

Kemudian KSK ini bertugas menyeleksi terhadap data dan syarat yang di berikan oleh PKSK untuk kemudian di sesuaikan dengan juknis dan juklak pada kriteria penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Dari 14 syarat yang dijadikan pedoman seleksi bagi KSK sebagai penerima BLT yang disesuaikan dengan juknis dan juklak ada hanya ada 12 butir yang sesuai dengan titik terendah dan dua butir yang tidak sesuai dari keadaan kondisi masyarakat sekitar, dua butir tersebut di antaranya : Penerangan tidak menggunakan listrik dan sumber air minum menggunakan sumur. Dua hal ini tidak digunakan dalam seleksi sebagai penerima BLT karena keadaan sekarang mayoritas meskipun warga kurang mampu sudah menggunakan listrik

sebagai penerangan karena bisa menyambung kabel dari tetangga sebelah dan juga sudah pernah ada program dari pemerintah pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu, selain itu semua warga juga sudah menggunakan air PAM ataupun PAMSIMAS karena umumnya sekarang tidak ada sumur lagi selain biaya yang malahan cukup mahal untuk pembuatan sumur, juga air sungai sudah tidak lagi jernih yang bisa digunakan untuk mandi dan mengambil air untuk konsumsi dan kebanyakan sungai sekarang sudah banyak yang mengering.

Sedangkan dari 14 kriteria yang di utamakan adalah penghasilan Kepala Keluarga yang kurang dari 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan, hal ini dijadikan patokan paling utama karena sumber penghasilan adalah faktor utama keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya, sehingga jika pendapatan Kepala Keluarga rendah maka mengakibatkan tidak tercukupinya dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga. Sehingga jika seseorang tidak mampu untuk memnuhi kebutuhan dasarnya maka bisa dikategorikan bahwa orang tersebut miskin. Oleh karena dibutuhkan masukan pendapatan agar keluarga tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya dan tambahan tersebut bisa di dapat dari adanya BLT.

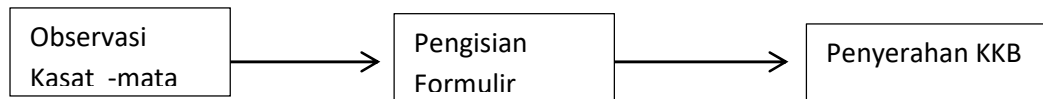
Tabel Hasil Seleksi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

No.	Syarat yang diseleksi	Di pakai	Tidak Dipakai
1.	Rumah berlantai Tanah	√	
2.	Tidak mempunyai fasilitas toilet yang memadai	√	
3.	Rumah masih berdinding dari papan/kayu murahan/rumbia/tembok yang belum di plester	√	
4.	Belum menggunakan listrik		√
5.	Sumber air menggunakan sumur/sumber mata air lain yang tidak terlindungi		√
6.	Menggunakan bahan bakar kayu untuk masak sehari-hari	√	
7.	Dalam seminggu mengkonsumsi daging/susu/ayam Cuma sekali	√	
8.	Makan hanya bisa dua atau satu kali dalam sehari	√	
9.	Mampu beli pakaian hanya satu kali dalam satu Tahun	√	

10.	Tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan ke Puskesmas/klinik	√	
11.	Penadapatan Kepala Keluarga kurang dari 500.000,- dalam sebulan	√	
12.	Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga SD Sederajat/tidak sekolah	√	
13.	Tidak memiliki barang berharga yang mudah di jual	√	
14.	Tidak memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi	√	

Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh Kepala Dusun dan dibantu oleh Ketua RT setempat dengan cara kasat mata atau meraba kondisi karena lingkungan sekitar merupakan tetangga yang notabene sudah paham kondisinya tanpa harus mendatangi dan menenayakan secara detail kepada calon Penerima BLT yang akan dicacah. Keuntungan dari pencacah model kasat

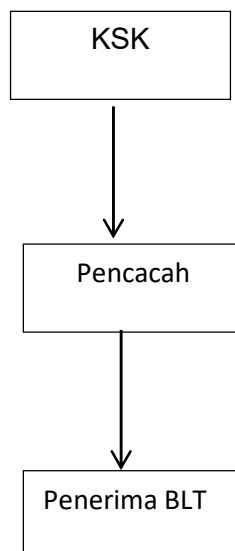
mata ini tidak membutuhkan waktu yang banyak karena pencacah langsung mengisi formulir tentang kondisi masing-masing warga sekitar yang ditetapkan sebagai calon penerima BLT dan menyerahkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). Gambaran Pendataan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut :



B. Penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Wonotunggal

menggunakan KKB untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Yaitu sebagai identitas penerima BLT sekaligus sebagai syarat pencairan dana BLT, berikut Tabel alur penyaluran Dana BLT sebagai berikut :

Untuk pencairan dana di Kantor Pos Indonesia yang telah ditunjuk



Dari alur tersebut bisa digambarkan bahwa penyaluran KKB sebagai identitas penerima BLT sudah sesuai dan tepat. KKB sebagai bentuk identitas syarat pencairan dana BLT. Pencairan dan penyaluran dana merupakan hal pokok terpenting karena dalam hal ini merupakan rangkaian wujud nyata tersampainya dana BLT ke tangan penerima yang memenuhi kriteria tersebut. Dana langsung di transfer dari pusat ke kantor pos dan kemudian disalurkan ke warga penerima berupa uang tunai dengan tujuan untuk mempercepat penyaluran dana BLT kepada penerima. BLT diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 4 periode dalam satu tahunnya.

Di kecamatan Wonotunggal penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibuat dengan sistem jadwal per Desa nya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekacauan dan antrian panjang saat pengambilan di Kantor Pos tersebut. Dalam prosesnya warga saat di Kantor pos di dampingi juga oleh RT dan Kepala Dukuh yang membantu warga masing-masing agar berjalan dengan tertib dan tepat sesuai dengan nama penerima yang sudah lolos seleksi.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya penyaluran dan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai sudah sangat transparan, karena mulai dari beberapa rangkaian kegiatan mulai dari pembagian KKB dan pencairan dana semua proses diketahui oleh Masyarakat, pengurus juga membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menanyakan hal-hal terkait penyaluran dana BLT tersebut.

C. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan penyaluran Dana Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal.

Evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat penting dilakukan untuk kelancaran dan ketepatan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan harapan pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal dapat berjalan sesuai dengan juknis dan juklak. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan dari pihak-pihak terkait maka agar dapat di

selesaikan sesegera mungkin. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Saat rekrutmen data bagi calon penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT);
2. Saat pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB);
3. Saat penyaluran dan pencairan dana di kantor pos Indonesia.

Selain evaluasi dan pengawasan dari tingkat Desa dan Kecamatan, petugas dari Kabupaten juga melakukan pengawasan dengan mendatangi *door to door* para warga yang menerima BLT untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data dan pelaksanaan penyaluran BLT yang di laporkan dari pihak Kecamatan kepada petugas Kabupaten. Hal ini juga sebagai upaya kontrol dan pengawasan terhadap kinerja KSK maupun PKSK terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah di amanahkan tersebut.

Dari pengawasan dan evaluasi yang kita cermati adalah data jumlah penerima BLT, jumlah warga yang mencairkan pada saat itu, kondisi dan situasi saat berlangsungnya pencairan BLT berjalan lancar atau ada kendala. Dan hasil dari pengawasan dan evaluasi ini dilaporkan pada KSK yang nantinya akan jadi bahan laporan ke tingkat Kabupaten yang mana akan jadi pedoman dalam proses dan langkah kegiatan program BLT ini.

C. Tanggapan dan Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan penyaluran Dana Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan dengan maksud dan tujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga beberapa bahan pokok dan BBM agar masyarakat kelas menengah kebawah (miskin) mampu meningkatkan daya beli terhadap bahan-bahan pokok rumah tangga, tanggapan dan sikap masyarakat sangat antusias dan positif dikarenakan dengan adanya BLT ini sangat membantu daya beli masyarakat, meringankan beban kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dengan adanya dana BLT mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, BLT di gunakan untuk membeli bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, lauk-pauk, susu dan lain-lain. Kebutuhan lain yang dapat dipenuhi seperti membayar hutang, membayar biaya sekolah, biaya berobat dan lain sebagainya. Dengan adanya BLT ini masyarakat merasakan adanya perhatian dari Pemerintah. Tanggapan dan sikap masyarakat yang merasa sangat terbantu menjadikan masyarakat antusias dan mendorong program Pemerintah yang berupa Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Bantuan yang berupa nominal uang sangat memudahkan masyarakat untuk mengalokasikan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.

Bantuan yang berupa uang tunai sangat memudahkan masyarakat untuk mengalokasikan daripada berbentuk barang-barang belum tentu yang dibutuhkan dan jika di uangkan pun belum tentu sejumlah nominal dari BLT tersebut. Dengan adanya bantuan BLT ini masyarakat sangat mendorong dengan program Pemerintah ini karena sangat membantu dan masyarakat merasa diperhatikan oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan pengawasan tersebut Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekrutmen terhadap Calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang belum sepenuhnya tepat sasaran. Proses pembentukan Petugas pengurus BLT sudah sangat sesuai dengan juknis dan juklak Program BLT yaitu di mulai dengan membentuka adanya Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) mempermudah syarat penerima

BLT pada juknis dan juklak dengan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat sekitar, Sehingga ada beberapa syarat yang tidak dipakai sebagai patokan utama dalam syarat penerima BLT. Dalam proses pencacahan calon penerima BLT ada beberapa ketidak tepatan dalam pendataan yang dilakukan yang seharusnya dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti PKSK mendata rumah tangga yang miskin berdasarkan data yang ada pada BPS di Kecamatan, dan kemudian pengisian formulir, dan dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan berikut wawancara dengan masyarakat. Dapat mengambil kesimpulan bahwa perekrutan terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Wonotunggal kurang tepat karena tidak melalui proses dan tahapan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan ada beberapa rumah tangga miskin yang tidak menadapat BLT atau kurang tepat sasaran.

2. Penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB)
KKB merupakan kartu sebagai identitas bagi penerima BLT dan syarat pencairan dana BLT sudah sesuai dengan ketentuan juknis maupun juklak yaitu dengan dicetak ganda satu diserahkan kepada KSK dan KKB duplikat diserahkan ke petugas Kantor Pos sebagai dasar dan kontrol dalam pencairan dana BLT dan KKB yang asli diserahkan kepada pencacah untuk diberikan kepada masyarakat penerima BLT. Kepala Dusun dan Ketua RT langsung mendatangi rumah warga untuk menyerahkan KKB.
3. Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal sudah sesuai dengan juknis dan juklak BLT yaitu pencairan dana dari pusat ke Kabupaten dan diteruskan ke Kantor Pos yang di tunjuk untuk di serahkan kepada

masyarakat yang berhak untuk menerima berupa uang tunai.

4. Tidak ditemukan adanya potongan terhadap penerimaan BLT, baik untuk biaya administrasi ataupun biaya lain terhadap penerima BLT. Jumlah yang diterima Masyarakat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tiga bulan.
5. Pelaksanaan pencairan dana BLT di Kecamatan Wonotunggal selalu tepat waktu dan pihak Kecamatan selalu memberikan informasi yang akurat dengan menyampaikan kepada pihak PKSK berupa tulisan maupun lisan dan kepada Kepala Dukuh serta RT setempat untuk kemudian disampaikan kepada warganya dengan membuat undangan pengambilan atau pencairan dana BLT di Kantor Pos setempat. Selama ini belum pernah ditemukan keributan dalam proses pencairan dana BLT di kantor Pos, dengan sistem penjadwalan dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Wonotunggal, selain penjadwalan hari juga dilakukan penjadwalan jam pengambilan sehingga satu hari bisa dibagi untuk pencairan dana BLT untuk 2 Desa sekaligus.
6. Telah dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Wonotunggal, Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada KSK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di tingkat Kabupaten.
7. Antusiasme warga Masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanggapan positif masyarakat tersebut dikarenakan dengan adanya program BLT ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga yang mengalami kenaikan akibat dari naiknya harga BBM.

SARAN

Dari pembahasan dan penelitian terhadap pelaksanaan penyaluran program BLT yang di peruntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka dapat kami kemukakan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas terkait yang menangani kesejahteraan Masyarakat baik tingkat Desa, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, adalah sebagai berikut ;

1. Tahapan rekrutmen
 - a. Untuk dinas tingkat Kabupaten seharusnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada petugas yang di tunjuk di tingkat Kecamatan, sehingga mereka mampu memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Petugas di tingkat Kecamatan seharusnya membuat surat edaran dan surat keputusan (SK) yang jelas terkait persyaratan penyesuaian rekrutmen sehingga ada pedoman yang jelas bagi petugas untuk dapat melakukan pencacahan secara tepat dan akurat.
 - c. Apabila pencacah melakukan pendataan secara kasat mata untuk dapat disertai wawancara sehingga mampu mendapatkan data masyarakat penerima BLT yang benar-benar membutuhkan.
 - d. Petugas pencacah seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan bersama warga masyarakat untuk membicarakan terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara terbuka.
2. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan proses pencairan dana

- a. Pendistribusian KKB dan pencairan dana BLT sudah baik, dan sesuai juknis dan juklak serta tidak ada komplain dari masyarakat, sehingga perlu di pertahankan dan jumlah nominal juga transparan sesuai tanpa adanya pemotongan apapun yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tiga bulan.
 - b. Petugas dari pihak Kecamatan perlunya melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengalokasian dari dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh masyarakat.
3. Pengawasan terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - a. Dari pihak Dinas Kabupaten harusnya melakukan pengawasan secara langsung ke Lapangan seperti dalam proses rekrutmen data penerima , pendistribusian KKB dan pada saat berlangsungnya pencairan dana BLT tersebut.
 - b. Adanya evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 4. Bagi Masyarakat
 - a. Kepada masyarakat alangkah baiknya menanyakan secara langsung kepada petugas, agar segala sesuatunya jelas dan transparan tanpa ada hal yang menggantung menjadi pertanyaan dan menimbulkan kesalahan pahaman;
 - b. Masyarakat perlu melaporkan apabila terjadi kecurangan – kecurangan kepada pihak yang berwenang, sehingga program BLT berjalan lancar dan sesuai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong.J. Lexy . 1990, “*Metode Penelitian Kebijakan Dan Evaluation Research*”, Yogyakarta: Rake sarasih

Noeng Muhadjir, Desember 2017 “*Metode Penelitian Kualitatif*”

Nazir, Moh. 1993.” *Metode Penelitian*” Jakarta:Ghalia Indah Indonesia

Rekso Prayitno, Soediono, 2000. “*Pengantar Ekonomi Makro*”, Yogyakarta BPPE
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang “*Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran*”

Zuriah, Nurul. 2006 “*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*”, Jakarta : PT Bumi Aksara